

Peningkatan Kolaborasi Instansi Pelayanan Publik untuk Memperkuat Deteksi Dini Hipertensi dan Diabetes

Irwan Budiana

Poltekkes Kemenkes Kupang

Korespondensi Penulis: budianairwan89@gmail.com

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kasus Hipertensi dan Diabetes di lingkungan instansi pemerintah (ASN/ TNI/ POLRI/ BUMN/ BUMD) tertinggi ke 2 setelah masyarakat yang tidak bekerja yakni 10,9% untuk Hipertensi dan 13,9% untuk Diabetes (SKI, 2023). Hal tersebut diperburuk oleh minimnya upaya deteksi dini dan pencegahan di internal instansi masing-masing. Minimnya pengetahuan, kemauan dan kemampuan kelembagaan maupun individu menjadi faktor utama masalah tersebut. Hal tersebut menjadi penyebab minimnya pemanfaatan layanan kesehatan, persepsi yang salah, dan minimnya kolaborasi antar instansi kesehatan dan non kesehatan. Adanya perjanjian kerjasama antar instansi menjadi bukti komitmen gerakan bersama mencegah dan mengendalikan Hipertensi dan Diabetes. Perjanjian kerjasama tersebut dapat diawali dengan kegiatan pendidikan kesehatan dan sosialisasi hasil SKI tahun 2023, advokasi kemungkinan kerjasama deteksi dini penyakit Hipertensi dan Diabetes, penandatanganan perjanjian kerjasama (MoU/MoA), pembentukan satuan tugas dari perwakilan masing instansi. penyusunan tujuan dan target bersama, program atau rencana kerja, jadwal dan monitoring dan evaluasi. Pengendalian *coersif* dalam bentuk sanksi dan hukuman menjadi bentuk tindak lanjut ketidaktercapaian target sasaran deteksi dini Hipertensi dan Diabetes.

LATAR BELAKANG

71% atau 36 juta kematian penduduk Dunia setiap tahunnya disebabkan oleh penyakit tidak menular (WHO, 2023). Prevalensi Diabetes dan Hipertensi di Indonesia mengalami peningkatan menjadi 2,2% Diabetes dan 8,6% Hipertensi (SKI, 2023). Masalah tersebut sejalan dengan fakta yang ditemukan dalam Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 yakni pada kasus Hipertensi 18,9% masyarakat melakukan pengendalian, 18,7%

tidak melakukan pemeriksaan kesehatan berkala, 62,8% penderita merasa sehat, 7,9% menggunakan pengobatan alternative herbal dan 19,3% merasa bosan, lupa dan malas menjadi alasan utama tidak patuh pengobatan. Sedangkan pada kasus Diabetes masyarakat melakukan pengendalian berupa pengaturan makan 81,4%, olah raga 41,7% dan 29,2% pengobatan alternatif. Terdapat 81,4% mendapatkan edukasi tentang pengobatan, 89,5% patuh minum obat, 13,5% tidak melakukan pemeriksaan berkala, 44,7% merasa sehat, 19% merasa malas/bosan minum obat dan 21,4% menggunakan obat tradisional. Penyelenggara pemerintahan seperti PNS/TNI/Polri/BUMN/ BUMD menjadi penduduk dengan dengan kejadian Hipertensi dan Diabetes paling tinggi nomor urut dua (2) setelah penduduk dengan status tidak bekerja yakni 10,9% untuk Hipertensi dan 13,9% untuk Diabetes (SKI, 2023). Tingginya kasus Hipertensi dan Diabetes pada aparat pemerintah seperti ASN/TNI/ POLRI/ BUMN/BUMD merupakan sebuah ironi sosial mengingat status ekonomi dan pendidikannya yang termasuk menengah ke atas.

DESKRIPSI MASALAH

Tingginya kasus Hipertensi dan Diabetes di lingkungan instansi pemerintah diperburuk oleh masih belum maksimalnya upaya pemeriksaan dan deteksi dini terhadap kedua Penyakit Tidak Menular (PTM) tersebut. Menurut hasil SKI tahun 2023, pada kasus Hipertensi terdapat 22,1% ASN/TNI/POLRI/BUMN/BUMD melakukan pengendalian, 12,6% tidak melakukan pemeriksaan tekanan darah berkala, 57,1% merasa sehat, dan 12,3% menggunakan pengobatan tradisional. Sedangkan pada kasus Diabetes 9,6% tidak melakukan pemeriksaan gula darah berkala, 34,7% merasa sehat, 88,7% mengatur pola makan dan 56,9% berolah raga. Rendahnya pencegahan dan pemeriksaan dan deteksi dini tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yakni:

1. Pengetahuan, kemauan dan kemampuan masyarakat terkait deteksi dini rendah
2. Minimnya akses ke layanan kesehatan: 17,7% masyarakat sangat sulit mengakses pelayanan kesehatan dan 10,0% tidak mengakses sama sekali fasilitas kesehatan dan 99,7% tidak pernah memanfaatkan layanan antar jemput (PSC 119)
3. Persepsi yang keliru tentang penyakit Hipertensi dan Diabetes.
4. Minimnya data hasil pemeriksaan atau deteksi dini penyakit Hipertensi dan Diabetes sebelumnya di tingkat instansi
5. Minimnya program pemeriksaan atau deteksi dini, pencegahan dan pengendalian penyakit Hipertensi dan Diabetes di tingkat instansi
6. Minimnya kerjasama dan kolaborasi antar instansi pemerintah untuk menyikapi tingginya penyakit Hipertensi dan Diabetes di instansi
7. Minimnya kebijakan atau aturan dari pada tingkat local maupun nasional pusat tentang pencegahan dan pengendalian Hipertensi dan Diabetes.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Adanya komitmen kepemimpinan pada semua level untuk menyikapi tingginya kasus Hipertensi dan Diabetes di instansi pemerintah menjadi langkah yang sangat strategis. Komitmen tersebut dapat berupa perjanjian kerjasama antar instansi untuk mencegah dan mengendalikan penyakit Hipertensi dan Diabetes. Perjanjian kerjasama tersebut dapat terwujud melalui beberapa upaya dengan tahapan sebagai berikut;

1. Melakukan kegiatan pendidikan kesehatan dan sosialisasi hasil SKI tahun 2023
2. Melakukan advokasi kemungkinan terwujudnya kerjasama untuk memperkuat deteksi dini penyakit Hipertensi dan Diabetes
3. Penandatanganan perjanjian kerjasama (MoU/MoA) untuk melakukan deteksi dini penyakit Hipertensi dan Diabetes pada tingkat hipertensi
4. Membentuk satuan tugas, peran dan tanggungjawab serta *sharing* sumber daya (SDM, teknologi, informasi, sarana, budget dan sumber daya lainnya).
5. Menyusun tujuan dan target bersama, program atau rencana kerja, jadwal dan monitoring dan evaluasi.
6. Pengendalian *coersif* dalam bentuk sanksi dan hukuman menjadi bentuk tindak lanjut ketidaktercapaian target sasaran deteksi dini Hipertensi dan Diabetes.

REFERENSI

1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). https://kesmas.kemkes.go.id/assets/upload/dir_519d41d8cd98f00/files/Inpres-Nomor-1-Tahun-2017-tentang-Gerakan-Masyarakat-Hidup-Sehat_674.pdf
2. Kemenkes RI (2015) 'Peraturan Menteri Kesehatan RI No 71 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular', (1775), p. 32. Available at: <https://p2ptm.kemkes.go.id>
3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2023) Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023 Dalam Angka, BKKP. Jakarta. Available at: <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/hasil-ski-2023/>.
4. (WHO),(2023, September 19). First WHO report details devastating impact of hypertension and ways to stop it. Retrieved from <https://www.who.int/news/item/19-09-2023-first-who-report-details-devastating-impact-of-hypertension-and-ways-to-stop-it>





Irwan Budiana

- Irwan Budiana, S. Kep., Ners., M.Kep Lahir tanggal 27 Juni 1989 di Dusun Londar Desa Loang Maka Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB. Sukses menyelesaikan pendidikan strata 1 dan profesi di STIKES YARSI Mataram jurusan keperawatan, menyelesaikan strata 2 di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pernah menjadi dosen di STIKES YARSI Mataram sebelum memutuskan berkarier menjadi dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Kesehatan Satuan Kerja Politeknik Kesehatan Kupang Provinsi NTT. Buku ini merupakan bentuk dedikasi dan tanggung jawab moral penulis terhadap masalah kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan tingginya kasus Penyakit Tidak Menular (PTM) yang disebabkan perubahan gaya hidup masyarakat.